

**Analisa yuridis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan Post Bidding Activity = Juridical analysis of the Commission's Decision Number 03/KPPU-L/2012 under Law Number 5 Year 1999 and Presidential's Rule Number 54 Year 2010 pursuant to post bidding activity**

Achmad Firmansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330809&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutuskan untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia.

.....Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mechanism of selecting the good/services provider is clearly stipulated within the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registrar, Ministry of domestic affairs budget year 2011-2012. There are several issues under the Commission's decision number 03/KPPU-L/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in commission's decision adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia.